

OMBUDSMAN JAMBI SERAHKAN RAPOR KEPATUHAN PEMDA DI PROVINSI JAMBI 2021

Rabu, 09 Februari 2022 - Reihana Ferdian

Siaran Pers

Nomor: 0007/HM.01-06/II/2022

Rabu, 9 Februari 2022

Jambi - Ombudsman RI Perwakilan Jambi menyerahkan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2021 bagi pemerintah daerah di Provinsi Jambi, pada Rabu (9/2/2022) di Ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Jambi.

Sebelum menyerahkan hasil kepatuhan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi memberikan sambutannya di hadapan hadirin pada acara tersebut.

Mengawali sambutannya, Saiful Roswandi menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan predikat zona hijau, lalu meminta daerah tersebut melakukan perbaikan hingga pada kualitas pelayanan.

"Saya ucapan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan predikat zona hijau. Keberhasilan ini saya harap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, terutama pada kualitas pelayanannya juga," katanya.

Berlanjut ke daerah yang mendapatkan predikat zona kuning, Saiful Roswandi meminta agar Bupati selaku penanggung jawab memberikan pembinaan kepada setiap unit kerja pelayanan publik agar dapat memperbaiki diri.

"Bagi yang masih masuk zona kuning, ini sudah menjadi tanggung jawab bagi Kepala Daerahnya untuk melakukan pembinaan agar di tahun berikutnya bisa masuk zona hijau. Selain untuk menjalankan undang-undang, hal ini juga untuk menunaikan janji saat kampanye pemilihan yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tambahnya.

Kemudian ia memaparkan bagaimana suatu daerah bisa mendapatkan zona kuning serta unit kerja mana yang masih perlu menjadi perhatian karena belum memenuhi standar pelayanan publik.

Lalu, Saiful Roswandi menyampaikan bahwa hasil penilaian kepatuhan ini merupakan pengingat bagi penyelenggara pelayanan publik agar terus memperbaiki diri karena di tahun 2022 bisa saja variabel kualitas pelayanan masuk dalam penilaian.

"Baru 4 saja unit kerja yang kita nilai, masih ada yang belum memenuhi standar pelayanan publik. Gimana mau kualitas pelayanannya baik kalo standarnya saja tidak dipenuhi. Saya harap ini jadi pengingat bagi unit kerja, apalagi unit kerja lain, karena di tahun 2022 ini mungkin lebih banyak unit kerja yang Ombudsman nilai dan variabel bisa saja bertambah hingga kualitas pelayanannya," pungkasnya.

Menutup sambutannya, Saiful Roswandi mengajak seluruh unit kerja di Provinsi Jambi melakukan Komitmen dan Deklarasi Perjanjian Kinerja Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

"Sampai saat ini. Kami belum melihat kesungguhan pemerintah daerah di Provinsi Jambi dalam pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Kami pertanyakan komitmennya. Seriuskah Kepala Daerah di Provinsi Jambi ini untuk mewujudkan hal tersebut," tegas Saiful Roswandi.

Untuk diketahui, hadir dalam pertemuan tersebut semua Bupati dan Walikota atau yang mewakili serta Asisten Tiga Pemerintah Provinsi Jambi mewakili Gubernur Provinsi Jambi.